



FUTURE SCIENCE

Editor : Ade Saputra Nasution, SKM., M.Kes.

ADVOKASI KESEHATAN

Penulis :

Riza Yuliawati | Achmad Djunawan

Ni Made Padma Batiari | Ervi Rachma Dewi

Abdul Wachid | Ardi Bastian | Syafrina Ulfah

Inayyah Nur Fitry Sirajuddin | Dhani Syahputra Bukit

Bunga Rampai

Advokasi Kesehatan

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Advokasi Kesehatan

Penulis:

Riza Yuliawati
Achmad Djunawan
Ni Made Padma Batiari
Ervi Rachma Dewi
Abdul Wachid
Ardi Bastian
Syafrina Ulfah
Inayyah Nur Fitry Sirajuddin
Dhani Syahputra Bukit

Editor:

Ade Saputra Nasution, SKM., M.Kes.



ADVOKASI KESEHATAN

Penulis:

Riza Yuliawati
Achmad Djunawan
Ni Made Padma Batieri
Ervi Rachma Dewi
Abdul Wachid
Ardi Bastian
Syafrina Ulfah
Inayyah Nur Fitry Sirajuddin
Dhani Syahputra Bukit

Editor: Ade Saputra Nasution, SKM., M.Kes.

Desain Cover: Nada Kurnia, S.I.Kom.

Tata Letak: Samuel, S.Kom.

Ukuran: A5 Unesco (15,5 x 23 cm)

Halaman: xii, 149

e-ISBN: 978-634-7037-71-8

Terbit Pada: Februari 2025

Hak Cipta 2025, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2025 by Future Science Publisher

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT FUTURE SCIENCE
(CV. FUTURE SCIENCE)
Anggota IKAPI (348/JTI/2022)

Jl. Terusan Surabaya Gang 1 A No. 71 RT 002 RW 005, Kel. Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota
Malang, Provinsi Jawa Timur.
www.futuresciencepress.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ini yang berjudul "*Advokasi Kesehatan*" dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai upaya memberikan wawasan yang mendalam mengenai advokasi kesehatan, sebuah pendekatan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, menggalang dukungan, dan memengaruhi kebijakan dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Buku *Advokasi Kesehatan* adalah panduan komprehensif yang menjelaskan konsep, strategi, dan implementasi advokasi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Buku ini terdiri dari sembilan bab yang disusun secara sistematis, memberikan wawasan mendalam bagi tenaga kesehatan, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum yang ingin memahami dan berkontribusi dalam advokasi kesehatan.

Bab pertama memperkenalkan konsep dasar advokasi kesehatan, termasuk tujuannya untuk memengaruhi kebijakan dan meningkatkan akses layanan kesehatan. Bab kedua membahas berbagai metode dan strategi, seperti pendekatan komunikasi, kolaborasi, dan negosiasi yang efektif. Selanjutnya, tahapan pelaksanaan advokasi dan pembagian peran antara pemangku kepentingan dijelaskan secara rinci pada bab ketiga. Bab keempat menyoroti pentingnya monitoring dan evaluasi dalam mengukur keberhasilan advokasi kesehatan, sedangkan bab kelima memperkenalkan konsep kemitraan sebagai fondasi kolaborasi lintas sektor. Bab keenam membahas peran

kebijakan publik dalam mendorong perubahan yang berkelanjutan, diikuti dengan bab ketujuh yang mengeksplorasi penggunaan media sebagai alat advokasi yang kuat. Etika dalam advokasi, termasuk tanggung jawab moral dan profesional, diuraikan dalam bab kedelapan. Peran tenaga kesehatan sebagai agen perubahan menjadi fokus utama bab kesembilan, yang diakhiri dengan pembahasan tentang advokasi untuk pengendalian penyakit, termasuk penyakit menular dan tidak menular.

Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penerbit Future Science, yang telah memberikan kesempatan dan dukungan penuh untuk penerbitan buku ini. Kepercayaan dan kerja sama yang terjalin dengan baik telah memungkinkan karya ini dapat disajikan kepada pembaca. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para penulis yang telah berkontribusi dalam buku ini. Keahlian, dedikasi, dan pengalaman mereka telah menjadikan buku ini kaya akan pengetahuan dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan pembaca. Setiap bab dalam buku ini ditulis dengan cermat berdasarkan sumber-sumber ilmiah terkini dan pengalaman praktis di bidang kesehatan.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para praktisi kesehatan, akademisi, mahasiswa, dan siapa saja yang peduli terhadap isu-isu kesehatan masyarakat.

Akhir kata, semoga buku ini dapat menjadi kontribusi yang bermakna dalam meningkatkan upaya advokasi kesehatan dan mendukung terwujudnya masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera.

Bogor, Desember 2024

Editor,

Ade Saputra Nasution

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB 1 METODE DAN STRATEGI ADVOKASI KESEHATAN . 1	
Riza Yuliawati.....	1
PENDAHULUAN	1
STRATEGI ADVOKASI BERDASARKAN SASARAN DAN PERUBAHAN YANG DIHARAPKAN	2
ADVOKASI ADALAH JALAN PANJANG DAN BERLIKU	9
STUDI KASUS ADVOKASI KESEHATAN DI BERBAGAI BELAHAN DUNIA	10
KESIMPULAN	12
BAB 2 TAHAPAN DAN PEMBAGIAN PERAN DALAM ADVOKASI KESEHATAN	17
Achmad Djunawan.....	17
PENDAHULUAN	17
TAHAPAN DALAM ADVOKASI KESEHATAN	18
PEMBAGIAN PERAN DALAM ADVOKASI KESEHATAN.....	25
KESIMPULAN	30
BAB 3 MONITORING DAN EVALUASI DALAM ADVOKASI KESEHATAN.....	33
Ni Made Padma Batiari.....	33
PENDAHULUAN	33

PENGERTIAN MONITORING DAN EVALUASI ADVOKASI.....	34
TUJUAN MONITORING DAN EVALUASI ADVOKASI.....	44
LANGKAH – LANGKAH MONITORING IMPLEMENTASI ADVOKASI.....	46
KESIMPULAN.....	51
BAB 4 KONSEP KEMITRAAN	55
Ervi Rachma Dewi.....	55
PENDAHULUAN	55
DEFINISI DAN KONSEP DASAR KEMITRAAN	56
PRINSIP KEMITRAAN.....	59
LANGKAH – LANGKAH MEMBANGUN KEMITRAAN EFEKTIF	61
MENGGALANG KEMITRAAN DALAM PROGRAM CSR	63
CSR PADA PRAKTIK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	66
KESIMPULAN.....	67
BAB 5 PERAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM ADVOKASI	
KESEHATAN	71
Abdul Wachid	71
PENDAHULUAN	71
KEBIJAKAN PUBLIK.....	72
ADVOKASI KESEHATAN.....	76
KESIMPULAN.....	83

BAB 6	ADVOKASI KESEHATAN BERBASIS MEDIA	87
	Ardi Bastian	87
	PENDAHULUAN	87
	PENGERTIAN ADVOKASI KESEHATAN	90
	KORELASI ADVOKASI DAN KOMUNIKASI.....	90
	KEDUDUKAN ADVOKASI KESEHATAN	92
	ADVOKASI DALAM BERBAGAI MEDIA.....	94
	PETISI SEBAGAI MEDIA ADVOKASI	96
	KESIMPULAN	99
BAB 7	ETIKA DALAM ADVOKASI KESEHATAN	101
	Syafrina Ulfah.....	101
	PENDAHULUAN	101
	PENGERTIAN ETIKA.....	102
	PENERAPAN ETIKA DALAM ADVOKASI KESEHATAN.....	104
	KESIMPULAN	114
BAB 8	PERAN TENAGA KESEHATAN DALAM ADVOKASI.....	117
	Inayyah Nur Fitry Sirajuddin	117
	PENDAHULUAN	117
	PEMBERDAYAAN DAN EDUKASI MASYARAKAT	117
	PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KESEHATAN	119
	PENYEDIAAN INFORMASI DAN DATA KESEHATAN.....	122
	ADVOKASI AKSES LAYANAN KESEHATAN.....	123

PENCEGAHAN PENYAKIT DAN PROMOSI KESEHATAN	125
PEMBERI SUARA BAGI KELOMPOK RENTAN.....	127
PENGERAK KAMPANYE KESEHATAN.....	129
KESIMPULAN.....	130
BAB 9 ADVOKASI UNTUK PENGENDALIAN PENYAKIT..	133
Dhani Syahputra Bukit.....	133
PENDAHULUAN	133
TUJUAN UTAMA ADVOKASI PENGENDALIAN PENYAKIT	136
STRATEGI DALAM ADVOKASI PENGENDALIAN PENYAKIT	139
LANGKAH-LANGKAH MERUMUSKAN ISSU STRATEGI ADVOKASI	141
STRATEGI PENDEKATAN ADVOKASI PENGENDALIAN PENYAKIT	143
KESIMPULAN.....	146

BAB 1

METODE DAN STRATEGI ADVOKASI KESEHATAN

Riza Yuliawati
Universitas Strada Indonesia, Kediri
E-mail: rizayuliawati@strada.ac.id

PENDAHULUAN

Kebijakan memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap sektor kesehatan. Tidak hanya terbatas pada kebijakan dalam bidang kesehatan, namun kebijakan di bidang lain juga sangat mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Sebagai contoh, kebijakan tata kota yang baik di Copenhagen Denmark menjadi salah satu faktor penyebab tingginya derajat kesehatan masyarakat di kota tersebut (Larsen & Manderson, 2009). Contoh yang lain, kurang ketatnya kebijakan pengendalian tembakau di Indonesia menyebabkan jumlah perokok anak tertinggi di Asia. Pentingnya kebijakan berwawasan kesehatan ditekankan melalui Ottawa Charter yang mencantumkan kebijakan berwawasan kesehatan sebagai aksi pertama (WHO, 2020).

Kebijakan memiliki dampak yang penting pada kesehatan karena kebijakan merupakan metode tercepat untuk merubah perilaku masyarakat (Michie & West, 2013). Metode lain dalam promosi kesehatan seperti pendidikan kesehatan, atau pemberdayaan memerlukan lebih banyak waktu untuk merubah perilaku. Sebagai contoh; penyebaran informasi secara langsung, atau melalui media tentang kewajiban memiliki kartu BPJS kesehatan akan sangat lama untuk memiliki keanggotaan BPJS kesehatan. Namun, kebijakan syarat kepemilikan dan perbaruan SIM harus didahului dan keanggotaan BPJS kesehatan yang aktif mau tidak mau membuat masyarakat

mengaktifkan keanggotaan BPJS kesehatan sebelum mengurus SIM.

Advokasi adalah upaya yang dilakukan secara sistematis untuk mempengaruhi sebuah kebijakan sehingga berpihak kepada kelompok masyarakat tertentu (Bochenek, 2019). Advokasi adalah proses vital dalam pembuatan kebijakan berwawasan kesehatan sehingga sector kesehatan dapat menjadi prioritas diantara persaingan kepentingan dengan bidang yang lain. Sebagai contoh, kebijakan pajak pada minuman manis dianggap menyulitkan bagi produsen, atau kebijakan lock down di masa pandemi COVID-19 ditentang oleh banyak pihak karena mematikan perekonomian. Sehingga penting bagi aktivis, akademisi atau professional dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kapasitas dalam advokasi sehingga kebijakan pemerintah berpihak kepada kesehatan. Bab ini akan membahas metode dan strategi yang digunakan untuk advokasi, yang diharapkan dapat meningkatkan wawasan aktivis, akademisi atau professional dalam advokasi di bidang kesehatan.

STRATEGI ADVOKASI BERDASARKAN SASARAN DAN PERUBAHAN YANG DIHARAPKAN

Pemilihan metode advokasi dipilih berdasarkan dua pertimbangan. *Pertama* adalah siapa kelompok sasaran advokasi. Sasaran advokasi secara umum terbagi menjadi tiga yaitu masyarakat, tokoh atau pembuat kebijakan. Masyarakat sebagai sasaran bisa masyarakat umum atau kelompok tertentu yang secara langsung terdampak sebuah isu (lansia, anak muda, ibu, imigran, dll). Tokoh adalah perseorangan atau kelompok yang diasumsikan mampu untuk menggiring opini masyarakat seperti selebriti, politisi, kelompok buruh, organisasi kemasyarakatan, asosiasi media massa dll. Sedangkan pembuat kebijakan diantaranya pejabat eksekutif atau legislatif atau yudikatif yang memiliki wewenang untuk merubah kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bochenek, L. M. (2019). What Is Advocacy and Why It Is Important? In *Advocacy and Organizational Engagement: Redefining the Way Organizations Engage* (pp. 21–38). Emerald Publishing Limited.
- Cecchini, M., Langer, J., & Slawomirski, L. (2015). Antimicrobial Resistance in G7 Countries and Beyond: Economic Issues, Policies. In *OECD* (Issue September).
- Coffman, J., & Beer, T. (2015). The Advocacy Strategy Framework: A tool for articulating an advocacy theory of change. In *Evaluation Innovation* (Issue March).
- NICE. (2022). *Advocacy services for adults with health and social care needs*. <https://www.nice.org.uk/guidance/ng227>
- Hernández-Aguado, I., Parker, L. A., Moore, M., & Walker, D. K. (2021). *Casebook on Advocacy in Public Health*. World Federation of Public Health Associations.
- Jessani, N. S., Ling, B., Babcock, C., Valmeekanathan, A., & Holtgrave, D. R. (2022). Advocacy, activism, and lobbying: How variations in interpretation affects ability for academia to engage with public policy. *PLOS Global Public Health*, 2(3 March). <https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0000034>
- Kostova, N. M., Boshevska, G., Stavrikj, K., & Organization, W. H. (2020). Promoting appropriate use of antibiotics in hospitals to contain antibiotic resistance in North Macedonia: EVIPNet evidence brief for policy, number 5. In *Promoting appropriate use of antibiotics in hospitals to contain antibiotic resistance in North Macedonia: EVIPNet evidence brief for policy, number 5*.
- Larsen, E. L., & Manderson, L. (2009). “A good spot”: Health promotion discourse, healthy cities and heterogeneity in contemporary Denmark. *Health and Place*, 15(2). <https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2008.10.001>

- Djamal. (2023, September 23). *Bogor Nominasi KTR ASEAN, Bima Arya: Pengendalian Tembakau Bukan Pencitraan*. <https://prohealth.id/bogor-nominasi-ktr-asean-bima-arya-pengendalian-tebakau-bukan-pencitraan/>
- Michie, S., & West, R. (2013). Behaviour change theory and evidence: A presentation to Government. *Health Psychology Review*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/17437199.2011.649445>
- Nakkash, R., Afifi, R., & Maziak, W. (2014). Research and activism for tobacco control in the Arab world. In *The Lancet* (Vol. 383, Issue 9915). [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)62381-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)62381-8)
- Nakkash, R. T., Torossian, L., El Hajj, T., Khalil, J., & Afifi, R. A. (2018). The passage of tobacco control law 174 in Lebanon: Reflections on the problem, policies and politics. *Health Policy and Planning*, 33(5). <https://doi.org/10.1093/heapol/czy023>
- Simanjuntak, J. (2022, September 8). *Kabupaten Klungkung, Contoh Terbaik Penerapan Perda KTR*. Dinas DKI Jakarta. <https://ktr.kemkes.go.id/artikel/33>
- Truong, J., Sandhu, P., Sheng, V., Sadeghi, Y., Leung, F., Wright, R., & Suleman, S. (2023). Advocacy in community-based service learning: perspectives of community partner organizations. *Canadian Medical Education Journal*. <https://doi.org/10.36834/cmej.74887>
- WHO. (2020, May 20). *Statement: World No Tobacco Day 2020*. <https://www.who.int/indonesia/news/detail/30-05-2020-statement-world-no-tobacco-day-2020>

PROFIL PENULIS



Riza Yuliawati

Penulis merupakan pembelajar, komunikator dan pemberdaya yang memiliki minat pada bidang kesehatan masyarakat. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana Kesehatan Masyarakat di universitas Airlangga dan strata 2 di the University of New South Wales Australia. Sejak mahasiswa strata 1, sudah aktif sebagai tenaga promosi kesehatan di sebuah lembaga zakat secara paruh waktu. Saat ini penulis aktif sebagai tenaga dosen kesehatan masyarakat di universitas STRADA Indonesia. Selain itu penulis tergabung dalam jaringan pengendalian tembakau nasional yang berjuang untuk melakukan advokasi agar perilaku merokok dilarang di tempat umum dan adanya aturan yang ketat untuk iklan produk tembakau.

BAB 2

TAHAPAN DAN PEMBAGIAN PERAN DALAM ADVOKASI KESEHATAN

Achmad Djunawan
Stikes Yayasan RS Dr Soetomo, Surabaya
E-mail: achmad.djunawan@stikes-yrsds.ac.id

PENDAHULUAN

Advokasi kesehatan adalah upaya terencana, terstruktur, dan sistematis untuk mempengaruhi, mengubah, menambah, atau memperkuat kebijakan di bidang kesehatan. Kebijakan di bidang kesehatan dapat berupa meningkatkan kesadaran dan mendorong tindakan yang mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Advokasi ini mencakup berbagai metode, mulai dari kampanye publik hingga lobi kebijakan. Pada dasarnya, advokasi kesehatan bertujuan untuk menciptakan perubahan sistemik yang memfasilitasi akses ke layanan kesehatan, memperbaiki kondisi sosial yang mendukung gaya hidup sehat, dan mengurangi kesenjangan kesehatan yang ada di masyarakat (Gostin & Powers, 2006).

Pendekatan advokasi kesehatan melibatkan sejumlah besar aktor, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah (LSM), institusi pendidikan, komunitas lokal, hingga individu yang berperan sebagai agen perubahan. Keterlibatan banyak pihak ini mendukung isi kebijakan yang komprehensif dan lengkap dari berbagai perspektif. Advokasi kesehatan dapat menghasilkan perubahan yang signifikan berkelanjutan jika dilakukan dengan mengikuti tahapan yang sistematis dan melibatkan berbagai pihak. Pembagian peran yang jelas dalam advokasi kesehatan dapat memperkuat upaya bersama untuk mencapai tujuan kesehatan yang diharapkan. Dalam bab ini, akan dibahas secara

mendalam tahapan advokasi kesehatan serta pembagian peran yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

TAHAPAN DALAM ADVOKASI KESEHATAN

Advokasi kesehatan merupakan upaya yang terstruktur dan berkelanjutan untuk memengaruhi kebijakan, memperbaiki kondisi sosial, serta meningkatkan kesadaran publik terhadap isu-isu kesehatan yang mendesak. Advokasi kebijakan sangat penting untuk mencapai tujuan kesehatan masyarakat dengan memastikan bahwa sumber daya, kebijakan, dan kemauan politik yang diperlukan tersedia untuk mendukung, meningkatkan, dan mempertahankan program kesehatan global (PATH, 2014). Proses ini memerlukan pendekatan yang terencana dan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, maupun masyarakat itu sendiri. Advokasi kesehatan yang efektif dapat menciptakan perubahan signifikan, baik dalam kebijakan publik, pelayanan kesehatan, maupun dalam perilaku masyarakat.

Proses advokasi kesehatan dibagi menjadi beberapa tahapan yang saling terkait dan berkesinambungan. Tahapan ini dimulai dengan identifikasi isu kesehatan yang memerlukan perhatian lebih, kemudian dilanjutkan dengan penetapan sasaran yang jelas serta pengembangan strategi yang komprehensif. Pada setiap tahapan membutuhkan data, dan analisis data, peran pihak yang berpengaruh, serta perencanaan yang matang. Advokasi kesehatan dapat mencapai tujuannya untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mengurangi beban penyakit dengan pendekatan yang terstruktur, sistematis, dan komprehensif.

Sebagai langkah pertama yang krusial dalam proses ini yaitu identifikasi isu kesehatan. Kegiatan ini akan membantu memastikan bahwa advokasi dilakukan pada area yang paling membutuhkan perhatian. Setelah itu, dengan tujuan yang jelas

jangka panjang dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kesenjangan kesehatan, dan menciptakan sistem kesehatan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Farrer, L., Marinetti, C., Cavaco, Y. K., & Costongs, C. (2015). Advocacy for health equity: a synthesis review. *The Milbank Quarterly*, 93(2), 392–437.
- Freeman, R. E. (2010). *Strategic management: A stakeholder approach*. Cambridge university press.
- Freudenberg, N. (2005). Public health advocacy to change corporate practices: implications for health education practice and research. *Health Education & Behavior*, 32(3), 298–319.
- Frisbee, S., & Studlar, D. (2011). Local Tobacco Control Coalitions in the United States and Canada: Contagion across the Border? *Presentado En La XI Annual Conference of the Canadian Political Science Association, Wilfrid Laurier University*, 16–18.
- Gostin, L. O., & Powers, M. (2006). What does social justice require for the public's health? public health ethics and policy imperatives. *Health Affairs*, 25(4), 1053–1060.
- Green, L., & Kreuter, M. (2005). *Health program planning: An educational and ecological approach*. (4th ed.). McGraw Hill.
- Loewenson, R. (2003). Civil society contributions to pro-poor, health equity policies. *Annotated Bibliography on Civil Society And Health*.
- Minkler, M., & Wallerstein, N. (2011). *Community-based participatory research for health: From process to outcomes*. John Wiley & Sons.

- PATH. (2014). *Stronger Health Advocates Greater Health Impacts*. <http://sites.path.org/advocacyimpact/>
- World Health Organization. (2014). *Global status report on noncommunicable diseases 2010*.
- World Health Organization. (2016). *World Health Statistics 2016 [OP]: Monitoring Health for the Sustainable Development Goals (SDGs)*. World Health Organization.

PROFIL PENULIS



Achmad Djunawan

Lahir di Pasuruan tanggal 31 Januari 1991. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Airlangga Surabaya. Penulis menyelesaikan pendidikan S2 jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Peneliti aktif berorganisasi selama perkuliahan baik di lembaga eksekutif mahasiswa maupun lembaga legislatif di tingkat mahasiswa. Penulis memiliki pengalaman kerja dalam pengumpulan data penelitian selama kuliah S1. Penulis memiliki pengalaman kerja sebagai Sekretaris Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit Darmo Tahun 2015-2016. Penulis pernah menjadi Asisten Dosen Mata Kuliah Kebijakan dan Manajemen Kesehatan di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Tahun 2018. Pada saat yang sama menjadi Tim Peneliti di Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Tahun 2018. Saat ini penulis menjadi Dosen serta menjabat sebagai kepala lembaga penjaminan mutu di Stikes Yayasan RS Dr. Soetomo Surabaya.

BAB 3

MONITORING DAN EVALUASI DALAM ADVOKASI KESEHATAN

Ni Made Padma Batiari
Politeknik Kesehatan Kartini Bali, Kota Denpasar
E-mail: padmabatiari@gmail.com

PENDAHULUAN

Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan yang penting dalam pelaksanaan setiap program, termasuk implementasi advokasi. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi akan memberikan informasi terkait proses, langkah – langkah pelaksanaan kegiatan, dan mengidentifikasi kendala – kendala serta intervensi yang diperlukan untuk perbaikan pelaksanaan pada kegiatan berikutnya (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022). Proses monitoring dan evaluasi pada dasarnya menjadi bagian dari mekanisme pengendalian dari sebuah program advokasi yang berkaitan dengan proses manajemen untuk mengamankan sistem agar tidak menyimpang dari rencana yang sudah ditetapkan sampai proses pelaksanaannya, sehingga dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Monitoring dan evaluasi dalam advokasi kesehatan mempunyai perbedaan dengan monitoring dan evaluasi program kesehatan pada umumnya. Hal tersebut berkaitan dengan salah satu contoh, yaitu evaluasi lebih sering berfokus pada kontribusi daripada atribusi langsung dari dampak dan dalam evaluasi advokasi lebih menekankan pada proses advokasi dibandingkan hasil akhirnya karena proses advokasi cenderung berjalan dalam jangka waktu yang panjang dan dinamis. Advokasi merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang menjadi suatu usaha sistematis dan terorganisir dengan tujuan

untuk memengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan kebijakan public secara bertahap maju (Suryani dan Yandrizal, 2022).

PENGERTIAN MONITORING DAN EVALUASI ADVOKASI

Monitoring dan evaluasi menjadi sebuah pendekatan yang digunakan untuk melacak kemajuan dari kegiatan advokasi yang dilaksanakan. Monitoring memiliki makna sebagai sebuah proses pengumpulan data secara berkesinambungan oleh pengelola satuan kerja terhadap kegiatan yang sedang berlangsung, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan lebih awal (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022). Monitoring dan evaluasi adalah teknik yang digunakan untuk mengetahui seberapa baik penerapan strategi advokasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Lankester dan Grills, 2019). Monitoring dan evaluasi ini juga membantu melihat efektivitas dalam mencapai tujuan dan mengukur keberhasilan.

Kegiatan monitoring pada umumnya dilakukan secara berkelanjutan dan komprehensif dengan memanfaatkan data kuantitatif untuk melakukan perbandingan capaian indikator yang ditelaah dalam konteks manajemen di suatu unit kerja. Monitoring dilakukan untuk mengukur kemajuan dalam mencapai hasil yang spesifik dalam kaitannya dengan rencana implementasi strategi (Coffman, 2022). Monitoring juga memberikan gambaran hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan advokasi, sehingga upaya *corrective action* dapat segera dilakukan oleh unit kerja terkait (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022). Monitoring menjadi proses rutin pengumpulan data yang dapat dilakukan setiap bulan, triwulan, atau tahunan (The Coalition to Build Momentum, Power,

KESIMPULAN

Advokasi bertujuan untuk menciptakan atau memperkuat kebijakan kesehatan masyarakat yang mendorong upaya – upaya kesehatan yang berkelanjutan . Monitoring dan evaluasi ini juga membantu melihat efektivitas dalam mencapai tujuan dan mengukur keberhasilan. Monitoring memberikan gambaran hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan advokasi, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menentukan secara sistematis dan objektif nilai atau signifikansi suatu strategi. Terdapat lima pedoman pertanyaan yang dapat digunakan untuk mempermudah dalam perencanaan monitoring dan evaluasi advokasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Carter, M., Winterstein, S. dan Emmel, A. (2024) “Advocacy Four Steps to Public Health Advocacy Success ;,” *Global Health Advocacy Incubator*, hal. 1–12. Tersedia pada: https://assets.advocacyincubator.org/uploads/2024/GHAI_Four_Steps_to_Public_Health_Advocacy_Success.pdf.
- Civil Society Engagement Mechanism (2021) “Tool 8 : Monitoring and Evaluation (M & E) Template,” *CSEM Online*. Tersedia pada: <https://csemonline.net/wp-content/uploads/2021/07/CSEM-Advocacy-Tool-8-2-11-21.pdf>.
- Coffman, J. (2022) “Monitoring and Evaluating Advocacy: Companion to the Advocacy Toolkit,” *Nicotine & tobacco research : official journal of the Society for Research on Nicotine and Tobacco*, hal. NP. Tersedia pada: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25015910>.
- Global Health Advocacy Incubator (2023) “Advocacy Action Guide: Four Phases to Health Policy Success,” hal. 41. Tersedia pada: https://assets.advocacyincubator.org/uploads/Advocacy_Action_Guide.pdf

ion_Guide_2023.pdf.

INTRAC (2020a) “M&E of Advocacy,” *INTRAC FOR CIVIL SOCIETY*, Juli. Tersedia pada: <https://www.intrac.org/wpcms/wp-content/uploads/2020/07/ME-of-advocacy.pdf>.

INTRAC (2020b) “M & E Tools for Advocacy,” *INTRAC FOR CIVIL SOCIETY*. Tersedia pada: <https://www.intrac.org/wpcms/wp-content/uploads/2020/07/ME-tools-for-advocacy-work.pdf>.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2022) *Pedoman Monitoring Pedoman Monitoring dan Evaluasi (Monev) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tersedia pada: <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/pedoman-monitoring-dan-evaluasi-badan-kebijakan-pembangunan-kesehatan/>.

Lankester, T. dan Grills, N. J. (2019) *Monitoring and Evaluating the Health Programme*. Oxford Medicine Online. doi: <https://doi.org/10.1093/med/9780198806653.001.0001>.

Suryani, D. dan Yandrizal (2022) *Advokasi Pelayanan Kesehatan*. Cetakan 1, *Sustainability (Switzerland)*. Cetakan 1. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi. Tersedia pada: http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/R_ED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

The Coalition to Build Momentum, Power, Activism, S. & S. in A. (COMPASS) (2022) *Handbook for Advocacy Champions*. Zimbabwe: COMPASS PZAT. Tersedia pada:

https://avac.org/wp-content/uploads/2023/12/MERLHandbookForAdvocacyChampions_COMPASSAfrica_March2022.pdf.

PROFIL PENULIS



Ni Made Padma Batiari, S.KM., M.K.M

Dosen Promosi Kesehatan Politeknik Kesehatan Kartini Bali, penulis lahir di Denpasar tanggal 22 Februari 1996. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan Politeknik Kesehatan Kartini (POLKESKA) Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Pascasarjana Universitas Respati Indonesia Jakarta. Penulis menekuni bidang menulis yang berfokus pada topik kesehatan masyarakat, khususnya promosi kesehatan. Beberapa hasil tulisan dari penulis berupa buku ajar dengan topik pemberdayaan masyarakat, analisis kebijakan kesehatan, dan promosi kesehatan. Saat ini penulis sudah mempunyai 3 buku ajar yang sudah terbit. Penulis juga mempunyai publikasi hasil penelitian yang telah terbit di Jurnal Nasional Terakreditasi.

BAB 4

KONSEP KEMITRAAN

Ervi Rachma Dewi
Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama, Kudus
E-mail: rachmadewiakbar@gmail.com

PENDAHULUAN

Hak dasar rakyat salah satunya adalah mendapat hak kesehatan, hal ini sesuai dalam (Undang-Undang Republik Indonesia 1945, 2013) pasal 28 H dan pasal 34 ayat 3 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan negara wajib menyediakannya. Oleh karena itu, untuk memenuhi hak dasar tersebut pemerintah melaksanakan upaya pembangunan nasional. Bagian yang tidak kalah penting dalam pembangunan nasional yakni pembangunan kesehatan masyarakat yang memiliki tujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup individu sebagai upaya tercapainya derajat kesehatan masyarakat setinggi – tingginya, karena jika masyarakat sehat maka negara akan memiliki banyak keuntungan diantaranya negara memiliki sumber daya manusia yang potensial dan berkualitas, penuh inovasi, dan mampu menghadapi tantangan masa depan. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan kerjasama atau gotong royong (kemitraan) dari berbagai level baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat agar tujuan tersebut tercapai sesuai dengan target rencana.

Kegiatan promosi kesehatan menjadi pilar utama dalam penguatan pembangunan kesehatan sebagai faktor penentu dalam pembangunan berkelanjutan. Sesuai dengan (PERMENKES No 74 Tahun 2015) bahwa perlu adanya peran strategis dari lintas sektor dalam mendukung perubahan perilaku

masyarakat. Dalam misi promosi kesehatan berisi tentang strategi atau pencapaian dari kegiatan promosi kesehatan yang pertama kegiatan advokasi, kedua kemitraan, dan yang ketiga gerakan masyarakat, strategi ini dilakukan dalam rangka untuk mendukung ketercapaian program pembangunan kesehatan masyarakat.

Pada bab ini akan dibahas lebih lanjut mengenai strategi kedua dalam promosi kesehatan, yakni adalah kemitraan. Menggalang kemitraan di bidang kesehatan kepada pihak – pihak potensial tidak kalah penting dengan strategi lain dalam promosi kesehatan, karena dalam membangun solidaritas, kekompakan, kerjasama, peran dan tanggungjawab dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi sumber daya. Di samping itu dapat meningkatkan tanggungjawab sektor terkait, serta penyelenggaraan pembangunan dapat dilaksanakan secara optimal.

Keberhasilan kemitraan tergantung komitmen dari berbagai pihak yang bermitra, sehingga diharapkan dapat menghasilkan sinergi yang bermanfaat untuk keberlanjutan program – program kesehatan yang ada di masyarakat. Pentingnya kegiatan kemitraan dikarenakan pembangunan kesehatan menjadi tanggung jawab berbagai pihak dan modal penting bagi keberhasilan sektor – sektor lainnya, misal sektor ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik yang tidak bisa terlepas dari sektor kesehatan. Apabila tidak adanya kesehatan maka dapat berdampak pada produktivitas kerja masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya perhatian dan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat khususnya kepada kegiatan – kegiatan yang bersifat promotif dan preventif.

DEFINISI DAN KONSEP DASAR KEMITRAAN

Istilah kemitraan memiliki kesamaan dengan istilah-istilah lainnya, seperti kolaborasi, aliansi, atau konsorsium. Kemitraan

dengan langkah – langkah sistematis, diantaranya menyiapkan MoU yang di dalamnya terdapat aturan – aturan dasar serta uraian syarat dan tanggung jawab kerjasama antara pihak – pihak yang terlibat. Kemitraan dengan badan usaha melalui CSR dapat dilakukan oleh organisasi ataupun lembaga, karena hal ini sebagai bentuk perhatian dan kepedulian pihak perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Di samping itu, pemberdayaan masyarakat melalui program kemitraan merupakan proses pembangunan masyarakat agar memiliki keterampilan, kesehatan dan kesejahteraan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Darwis and Marsofely, R.L. (2022) *Membangun Kemitraan*. CV Green Publisher : Cirebon.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (2010) *Profil Kesehatan Indonesia 2009*.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (2019) *Buku Panduan Menggalang Kemitraan di Bidang Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat (GERMAS)*. Available at: <https://promkes.kemkes.go.id/pub/files/files68278FinalBUKU KEMITRAAN 2019.pdf>.
- Kesehatan, I., Lembaran, T. and Republik, N. (2018) ‘PERMENKES NOMOR 40’, (1181), pp. 1–58.
- Masyarakat, B.P.P.A.U.D. dan P. (2019) *Bahan Ajar Membangun Kemitraan*. BP-PAUD dan DIKMAS : Banjarbaru.
- Nabilla, A. and Hamid, A. (2021) ‘Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa’, *Journal of Social Work and Social Services*, 2(2), pp. 103–111. Available at: <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/khidmatsosial/article/view>

- /14121/7353.
- Notoatmodjo, S. (2014) ‘Promosi kesehatan dan ilmu perilaku’, *Jakarta: rineka cipta*, 20.
- PERMENKES No 74 Tahun 2015 (2015) ‘Permenkes Nomor 74 thun 2015’, in.
- Presiden_RI (2012) ‘Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas’, pp. 1–6. Available at: <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>.
- Rina, B., Abdulhak, I. and Shantini, Y. (2020) ‘Jalinan Kemitraan Program Posyandu dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan’, *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 4(2), pp. 112–123. Available at: <https://doi.org/10.21831/diklus.v4i2.31620>.
- Undang-Undang 1945 Perubahan Kedua (2013) *Undang Undang 1945 Perubahan Kedua*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun (2008) ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008’, (1).

PROFIL PENULIS



Ervi Rachma Dewi

Tahun 2010 menyelesaikan S1 Kesehatan Masyarakat di UNNES dan pada tahun 2015 menyelesaikan Pendidikan Magister Promosi Kesehatan di UNDIP. Semenjak tahun 2015 menjadi dosen tetap di Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus Program Studi Kesehatan Masyarakat. Hingga saat ini telah menulis beberapa judul buku diantaranya:

Buku Ajar Dasar Promosi Kesehatan penerbit Al Qalam Media Lestari tahun 2020, Buku Ajar Komunikasi Kesehatan penerbit Undip Press tahun 2022, Konsep Dasar Kesehatan Masyarakat penerbit CV. Al Qalam Media Lestari tahun 2023, Kumpulan Resep PMT Balita Stunting Berbasis Pangan Lokal penerbit Deepublish Yogyakarta tahun 2023, dan Buku Panduan Stunting, Aksi Percepatan Penurunan Stunting penerbit Deepublish Yogyakarta tahun 2023.

BAB 5

PERAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM ADVOKASI KESEHATAN

Abdul Wachid

Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus

E-mail: abdulw4ch1d78@gmail.com

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang telah bersepakat memilih jalan sistem demokrasi perwakilan dalam pengelolaan negara, maka pejabat publik sebagai wakil dari kekuasaan rakyat yang dipilih melalui sistem jalur pemilu berkewajiban untuk memenuhi harapan dari rakyat itu sendiri. Salah satu manfaat dari pelaksanaan demokrasi adalah munculnya pembaharuan kehidupan sosial, dimana akan muncul harapan baru dalam kehidupan sosial masyarakat melalui keputusan – keputusan yang diambil oleh para pejabat publik. Setiap keputusan dari pejabat publik tentu akan membawa dampak bagi masyarakat, baik dapat baik atau dapat kurang baik yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh sebab itu penting bagi masyarakat untuk ikut serta dalam mengawal setiap kebijakan dari pejabat publik, agar setiap kebijakan yang ada dapat sesuai dengan harapan dari masyarakat.

Advokasi sebagai salah satu cara dari sistem kontrol masyarakat untuk mengawal setiap kebijakan publik agar berpihak pada kepentingan masyarakat dalam berbagai bidang. Advokasi kesehatan sebagai salah satu upaya dari masyarakat untuk meningkatkan derajat kehidupan masyarakat yang lebih sehat dengan cara mengawal setiap kebijakan yang di keluarkan oleh pejabat publik terkait dengan kesehatan, sehingga sesuai dengan kondisi nyata permasalahan kesehatan yang muncul di tengah – tengah masyarakat. Advokasi kesehatan dapat

dilakukan oleh siapapun bagi mereka yang merasa berkepentingan terhadap sebuah kebijakan publik di bidang kesehatan. Advokasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik melalui proses yudisial atau non yudisial. Advokasi memalui proses yudisial dengan cara melakukan gugatan suatu kebijakan kesehatan yang dikeluarkan oleh pejabat publik melalui proses hukum yang dapat dilakukan baik melalui Mahkamah Konstitusi untuk menguji sebuah Undang-Undang atas Undang - Undang Dasar, atau melalui Mahkamah Agung untuk menguji peraturan yang ada di bawah Undang – Undang. Advokasi non yudisial dilakukan melalui upaya – upaya pendekatan baik secara struktural maupun pendekatan secara personal. Pendekatan – pendekatan itu dapat dilakukan melalui lobi, audiesi, seminar, debat, maupun melalui penegrahan masa.

Pentingnya peran proses advokasi kesehatan sebagai upaya pengawalan terhadap setiap kebijakan kesehatan yang dibuat oleh pejabat publik menjadi kunci agar kiranya pejabat publik dalam membuat keputusan yang berdampak pada masyarakat, harus betul – betul memperhatikan dampak yang muncul atas keputusan tersebut. Setiap kebijakan yang diambil tentu tidak dapat menyenangkan seluruh masyarakat, tentu akan ada orang atau pihak yang merasa kurang puas terhadap kebijakan yang ada. Adanya proses advokasi kesehatan terhadap setiap kebijakan publik di bidang kesehatan diharapkan memunculkan peran serta aktif dari masyarakat dalam ikut serta mengontrol jalannya penyelengaraan pemerintahan agar berjalan sesuai dengan prinsip - prinsip *Good Governance*.

KEBIJAKAN PUBLIK

Pengertian

Kalau kita lihat dari kata kebijakan disana ada kata dasar bijak yang dapat dimaknai sebagai sikap yang tepat dalam menyingkapi setiap keadaan atau peristiwa yang terjadi dengan

yang baik. Proses lobi, audiensi maupun pengerahan masa, membutuhkan persiapan matang dan pengaturan staratergi untuk tercapainya tujuan yang ingin di capai dalam advokasi kesehatan. Proses dalam melakukan sebuah advokasi kesehatan tidak akan lepas dari ilmu dan seni, karena mempengaruhi dan meyakinkan terkait ide dan gagasan yang kita tawarkan membutuhkan pengetahuan yang cukup sesuai bidangnya, namun dilain pihak juga membutuhkan rasa seni karena dalam proses advokasi tidak ada yang tetap, semuanya serba dinamis sehingga membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam menyesuaikan dengan kondisi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahardian, R. (2020). *Memahami Advokasi Kebijakan : Konsep, Teori, dan Praktik dalam Mewujudkan Kebijakan yang Berpihak pada Publik*. CV Budi Utama.
- Salampessy, M., Suharyanto, D., Mesra, R., Qadri, U. L., Amane, A. P. O., Alaslan, A., ... & Siallagan, D. Y. (2023). *Kebijakan Publik*. CV. Gita Lentera.
- Septiana, A. R., Bormasa, M. F., Alalsan, A., Mustanir, A., Wandan, H., Razak, M. R. R., ... & Seran. (2023). *Kebijakan Publik: Teori, Formulasi Dan Aplikasi*. (Issue May). Global Eksekutif Teknologi.
- Suryani, D., Yandrizal. (2022). *Advokasi Pelayanan Kesehatan. Literasi Nusantara Abadi*.
- Trisnaningsih, R. (2024). *Bunga Rampai Promosi Dan Pendidikan Kesehatan*. Media Pustaka Indo.

PROFIL PENULIS



Abdul Wachid, S.H., M.H.

Lahir di Pemalang tanggal 25 Agustus 1978. Menempuh pendidikan sarjana strata satu di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, lulus tahun 2001 dan melanjutkan pendidikan magister di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, lulus tahun 2011 dan saat ini aktif sebagai Dosen tetap di Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat Institut Teknologi Cendekia Utama Kudus.

BAB 6

ADVOKASI KESEHATAN BERBASIS MEDIA

Ardi Bastian
Universitas STRADA Indonesia, Kediri
E-mail: ardibastian1987@gmail.com

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi saat ini telah membawa kita pada era digital. Perkembangan di era digital begitu pesat sehingga semua pekerjaan yang penting dan strategis dapat diselesaikan secara daring. Salah satu periode kehidupan yang maju pesat dan bergerak menuju bentuk digital adalah "era digital". Hal yang tidak mungkin bagi manusia untuk menghentikan kemajuan pesat era digital ini. Keadaan itu terjadi karena pada dasarnya manusia selalu menginginkan berbagai hal dapat dilakukan dengan mudah dan tidak rumit. Hal ini juga akan mengakibatkan berbagai macam efek, baik secara positif maupun negatif. Era digital tidak hanya terjadi dalam sektor industri *manufacture* saja, akan tetapi era digital sudah merasuki berbagai sendi kehidupan.

Tidak terelakkan lagi bahwa pertumbuhan teknologi digital akan mendukung berbagai usaha baru atau usaha yang dapat meningkatkan perekonomian. Banyak anak muda saat ini bahkan berani untuk memulai bisnis digital. Era digitalisasi terus berkembang sehingga diikuti juga oleh perkembangan teknologi ke arah otomatisasi atau peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam operasionalnya. Di setiap industri, otomatisasi dimungkinkan juga terjadi pada saat munculnya era digital ini. Hal-hal yang terus berkembang pada era digital adalah sebagai berikut.

1. Bidang Komunikasi

Bercicara tentang era digital, tentu saja bidang komunikasi merupakan salah satu bidang yang berkembang sangat pesat. Dulu, komunikasi masih dengan cara menggunakan ponsel dan kartu SIM untuk berinteraksi dengan orang-orang yang kehidupannya berada di jauhan. Namun, kemajuan komunikasi di era digital seperti saat ini difasilitasi oleh telepon pintar yang saat ini hadir dengan sejumlah kemampuan canggih. Salah satu bagian penting yang ada pada gawai *smartphone* atau ponsel pintar pada saat ini adalah dengan munculnya peran internet yang lebih optimal dan dapat digunakan untuk berkomunikasi serta dapat saling terhubung dengan orang lain. Selain itu, ketersediaan teknologi saat ini memungkinkan panggilan video, yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa dampak era digital terhadap komunikasi kini mulai terasa.

2. Adanya Aplikasi Dalam Bisnis

Era digital juga mulai memberikan dampak pada dunia bisnis saat ini. Saat ini, ada banyak sekali aplikasi yang tersedia di dunia korporat. Dengan bantuan aplikasi-aplikasi ini, para pebisnis dapat dengan mudah menjangkau klien atau target pasar yang lebih luas. Lingkungan bisnis saat ini sangat berbeda dengan masa lalu. Pasalnya, di masa lalu, para pengusaha memiliki tantangan dalam hal pemasaran dan pengenalan produk mereka kepada konsumen. Pebisnis yang tidak mengikuti perkembangan terbaru di era digital biasanya akan kalah bersaing dengan para pesaingnya yang sudah mulai menyesuaikan operasinya dengan lingkungan baru.

3. Teknologi Keuangan

Seiring dengan perkembangan era digital, sektor keuangan juga mengalami perkembangan. Hal ini terlihat dari

3. iPetitions
4. Causes
5. Civist
6. GoPetition
7. Thepetitionsite

KESIMPULAN

Advokasi merupakan sebuah proses komunikasi sehingga tentu tidak akan jauh dari prinsip dan unsur komunikasi dalam penerapannya. Hanya saja tujuan dari komunikasi dalam advokasi ini adalah secara spesifik untuk membuat atau merubah suatu kebijakan. Media dalam advokasi berperan penting sebagai sarana menyampaikan informasi. Peran aktor advokasi sebagai komunikator dalam merancang pesan advokasi, dan *decision maker* sebagai komunikan, merupakan unsur pembangun dari sebuah proses komunikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Espine, S. (2008). Developing Advocacy for Children and Young People. Jessica Kingsley Publisher.
- Jhanattan, M. (2020). Model Komunikasi Advokasi Pencegahan Korupsi Pada Media Publikasi Humas Lembaga KPK. IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora, 4(3), 105–110. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/download/817/616>
- Luik, Jandy dan Aritonang, A. (2021). Freelancers Media dalam Era Digital. Jakarta : Kencana.
- Milyane, T. M., & Dkk. (2022). Pengantar Ilmu Komunikasi. In Suparyanto dan Rosad (2015 (Vol. 5, Issue 3). <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/557082-pengantar-ilmu-komunikasi-22ec77af.pdf>
- Prasanti, D. G. (2023). Jurnalisme Advokasi dalam Pemberitaan

Covid-19 Oleh TVRI Pusat. Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Prayitno, E. (2017). Media Sosial untuk Advokasi Publik. In ICT Watch.

https://perpustakaan.kasn.go.id/index.php?p=show_detail&id=380

University, J. H. (1990). A Frame For Advocacy.

Zastrow, C. (1982). Introduction to Social Welfare: Institutions, Social Problems, Services and Current Issue.

PROFIL PENULIS



Ardi Bastian, S.KM., M.M., M.Kes.

Penulis adalah pengajar di Universitas STRADA di Indonesia pada Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit dengan peminatan di Manajemen Kesehatan, Kesehatan Masyarakat, dan Pemberdayaan Masyarakat. Penulis lahir di Nganjuk, pada tanggal 14 November 1987 memulai pendidikan di SDN Gebangkerep II Baron Nganjuk, kemudian MTsN 2 Kediri, dan pendidikan atas di SMAN 2 Kediri. Mendapatkan gelar S1 Kesehatan Masyarakat di Universitas Airlangga, Surabaya, S2 Manajemen Universitas Gajayana, di Malang, kemudian menempuh S2 Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Surabaya. Mempunyai pengalaman berkecimpung di Bidang Penanggulangan HIV dan AIDS baik di pemerintahan maupun di LSM. Pernah mendampingi program penanggulangan HIV dan AIDS di Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya serta pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.

BAB 7

ETIKA DALAM ADVOKASI KESEHATAN

Syafrina Ulfah
Universitas Sumatera Utara
E-mail: syafrinaulfah@usu.ac.id

PENDAHULUAN

Advokasi sangat penting untuk mewujudkan perubahan yang efektif sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas. Advokasi merupakan aktivitas menyuarakan, menarik perhatian masyarakat terhadap isu-isu penting, serta mengarahkan para pengambil kebijakan menuju solusi yang diharapkan. Dalam bidang kesehatan, advokasi memiliki peran penting untuk memastikan para pengambil keputusan memiliki pemahaman mengenai kebijakan kesehatan yang ada serta menyadari tanggung jawab mereka dalam menerapkan kebijakan tersebut. Advokasi juga berperan untuk menciptakan dukungan dari masyarakat serta mendorong permintaan dari masyarakat untuk menerapkan suatu kebijakan kesehatan. Selain itu, advokasi juga berperan untuk menjamin alokasi sumber daya keuangan yang memadai bagi program dan layanan kesehatan. Selanjutnya, advokasi berperan dalam menginformasikan masyarakat umum maupun pemimpin terkait isu dan permasalahan kesehatan, serta mendorong mereka untuk memberikan tekanan kepada pengambil keputusan agar melakukan tindakan bahkan pada tingkat akar rumput untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang terjadi (World Health Organization, 2018).

Advokasi yang efektif memerlukan identifikasi isu, komunikasi yang tepat, serta penerimaan pesan-pesan kunci oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Namun terdapat hal yang harus diperhatikan bahwa dalam penyampaian pesan advokasi, termasuk advokasi kesehatan, yakni harus memperhatikan etika. Etika dalam advokasi kesehatan menjadi sangat penting agar dapat memberikan manfaat kepada penerima layanan kesehatan yakni masyarakat luas.

Penerapan etika telah diterapkan dalam berbagai konteks, seperti etika sosial, etika profesi, maupun etika dalam bidang kesehatan. Etika merupakan seperangkat prinsip moral yang menentukan bagaimana individu atau kelompok bertindak. Fokus utama etika berkaitan dengan nilai benar atau salah dari suatu tindakan, termasuk dalam proses pengambilan keputusan sehingga dapat memengaruhi konsekuensi akhir dari tindakan tersebut. Untuk menghindari masalah etika, bahkan dalam banyak profesi telah dibuat pedoman agar orang-orang yang berkecimpung dalam profesi tersebut tidak terlibat dalam isu etika.

PENGERTIAN ETIKA

Istilah etik dan etika sering dipertukarkan penggunaannya. Etik berasal dari kata Yunani yaitu *ethos* yang berarti akhlak, sikap, perasaan, watak, kebiasaan, ataupun adat yang layak dan yang baik (Triwibowo, 2017). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etik merupakan kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, etik juga dapat diartikan sebagai nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat, sedangkan etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak), kumpulan atau seperangkat asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, ataupun nilai yang benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016). Dengan kata lain, etika lebih mengarah pada ilmu yang mempelajari asas

merugikan pihak lain, kemaslahatan, kerahasiaan, keadilan, serta memegang teguh komitmen ataupun kode etik profesi kesehatan. Pendekatan yang didasarkan pada etika dalam advokasi kesehatan sangat penting agar setiap langkah yang diambil menghasilkan dampak positif yang berkelanjutan, tidak hanya bagi individu yang terlibat langsung, tetapi juga bagi masyarakat luas. Dengan menanamkan prinsip-prinsip etika secara menyeluruh, advokasi kesehatan dapat mencapai tujuannya untuk melindungi kepentingan publik, meningkatkan kesejahteraan sosial, serta mendorong terciptanya sistem kesehatan yang lebih adil dan inklusif untuk semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). KBBI Daring. Diambil 5 November 2024, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/etik>
- Butts, J. B., & Rich, K. L. (2023). *Nursing ethics: Across the curriculum and into practice*. Burlington: Jones & Barlett Learning.
- Pratomo, H. (2015). *Advokasi: Konsep, teknik, dan aplikasi di bidang kesehatan di Indonesia*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Reid, L. (2022). Ethics of advocacy. *Rhode Island Medical Journal*. Diambil dari https://www.researchgate.net/publication/359664383_Ethics_of_Advocacy
- Suyani, D., & Yandrizal. (2022). *Advokasi pelayanan kesehatan*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Triwibowo, C. (2017). *Etika dan hukum kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Tumurang, M. N. (2018). *Promosi kesehatan*. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.
- World Health Organization. (2018). Advocating for change for

adolescents. <https://doi.org/10.5040/9798216035534.ch-005>

World Health Organization. (2024). Health promotion. Diambil
5 November 2024, dari
<https://www.who.int/southeastasia/health-topics/health-promotion>

PROFIL PENULIS



Syafrina Ulfah, S.K.M., M.K.M.,

Lahir di Medan, 25 September 1991. Saat ini penulis tinggal di Medan, Sumatera Utara. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Saat ini penulis merupakan salah satu dosen pada Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Jalin kerja sama dengan penulis via surel syafrinaulfah@usu.ac.id.

BAB 8

PERAN TENAGA KESEHATAN DALAM ADVOKASI

Inayyah Nur Fitry Sirajuddin
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, Medan
E-mail: inayyahnfs@gmail.com

PENDAHULUAN

Advokasi dalam kesehatan adalah upaya sistematis untuk mempengaruhi kebijakan, praktik, dan perilaku yang mendukung kesehatan masyarakat sehingga dapat menciptakan perubahan sosial dan kebijakan yang mendukung kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat (Suryani & Yendrizal, 2022). Tenaga kesehatan dalam advokasi berperan sangat penting untuk mempengaruhi kebijakan publik, perilaku masyarakat, memperjuangkan perubahan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan umum dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya yang akan berdampak positif pada kesehatan populasi dan komunitas tertentu (Adjunct & Marniati, 2021).

PEMBERDAYAAN DAN EDUKASI MASYARAKAT

Tenaga kesehatan masyarakat dalam advokasi pemberdayaan dan edukasi masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menjaga kesehatan, memberdayakan masyarakat untuk mandiri dalam menjaga kesehatan masyarakat serta mendorong perilaku hidup sehat (Topatimasang, 2005). Dengan peran ini, tenaga kesehatan tidak hanya membantu masyarakat memahami pentingnya kesehatan, tetapi juga menciptakan komunikasi yang lebih kuat dan lebih sehat.

1. Sebagai penyuluhan dan edukator kesehatan. Tenaga kesehatan berperan sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat. Tenaga kesehatan bertugas menyampaikan informasi yang akurat dan berbasis bukti mengenai berbagai topik kesehatan, seperti pencegahan penyakit menular, gizi kesehatan, kebersihan dan kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, serta pengelolaan penyakit kronis.
2. Membantu meningkatkan kesadaran kesehatan di masyarakat. Tenaga kesehatan bertugas untuk mengidentifikasi dan mengatasi miskonsepsi mengenai kesehatan yang terjadi di masyarakat. Tenaga kesehatan membantu masyarakat memahami isu-isu kesehatan yang benar, termasuk mengklarifikasi kesalahpahaman atau mitos yang beredar di masyarakat. Mereka membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pencegahan penyakit dan akses terhadap pelayanan kesehatan.
3. Pemberdayaan Individu dan Komunitas. Dalam hal ini tenaga kesehatan mengajarkan keterampilan kesehatan. Tenaga kesehatan bertindak sebagai pendidik yang membantu masyarakat mempelajari keterampilan dasar untuk menjaga kesehatan mereka sendiri, seperti Teknik pertolongan pertama, pengelolaan stress, atau cara menjaga pola makan sehat. Selain itu, tenaga kesehatan juga membantu memberdayakan masyarakat untuk mandiri. Tenaga kesehatan mendorong masyarakat untuk menjadi lebih mandiri dalam hal kesehatan, dengan membantu masyarakat mengakses sumber daya kesehatan yang tersedia dan mengambil keputusan yang bijak terkait kesehatan mereka.
4. Tenaga kesehatan membantu masyarakat untuk membentuk perilaku hidup sehat melalui motivasi perubahan perilaku kearah yang lebih positif. Tenaga kesehatan mendorong

memanfaatkan data atau penelitian, tenaga kesehatan tidak hanya memastikan bahwa kebijakan kesehatan yang diusulkan berdasarkan bukti yang kuat, tetapi juga bahwa kebijakan tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok yang paling rentan. Melalui advokasi yang efektif, tenaga kesehatan dapat menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan signifikan dalam kesehatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjunct, A., & Marniati, M. (2021). *Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat* (S. Nurachma (ed.); 1st ed.). Depok: Rajagrafindo Persada.
- Bernadetha, B., Nurhidayati, N., Nasrullah, N., Basri, M., Bugis, D. A., Askar, A., Lestari, P., Pellondo, K. B. Y., & Pemayung, I. D. G. . (2022). *Pengantar Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan* (M. M. J. Panjaitan (ed.); 1st ed.). Yogyakarta: Selat Media Patners.
- Freska, W. (2023). *Advokasi Kesehatan Mental* (D. Larasati (ed.); 1st ed.). Bantul: CV. Mitra Edukasi Negeri.
- Ningrum, S., Nurasa, H., & Munajat, E. (2021). Study Literature Review Advokasi Kebijakan Kesehatan Mental. *Journal Publicuho*, 4(4), 1043. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i4.21345>
- Sunarsih, S., Gunawan, M. R., Hartini, S., Sholihat, N., Arsyad, G., Murwati, M., Sastrini, Y. E., Umam, M. K., Nurliyani, N., Herdiani, I., & Cahyadin, C. (2023). *Promosi dan Penyuluhan Kesehatan* (1st ed.). Tahta Media Group.
- Suryani, D., & Yendrizal, Y. (2022). *Advokasi Pelayanan Kesehatan* (F. Andriansyah (ed.); 1st ed.). CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Topatimasang, R. (2005). *Sehat itu Hak: Panduan Advokasi Masalah Kesehatan Masyarakat* (M. Waluyono (ed.); 1st ed.). Koalisi untuk Indonesia Sehat (KuIS).

[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=T6deDwAQBAJ&oi=fnd&pg=PA11&dq=Topatimasang,+R.+%\(2005\).+Sehat+itu+Hak:+Panduan+Advokasi+Masalah+Kesehatan+Masyarakat.+&ots=j8sNF5BLyD&sig=pAAUPZh_v5fmP56rlT_0t0EVQM0&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=T6deDwAQBAJ&oi=fnd&pg=PA11&dq=Topatimasang,+R.+%(2005).+Sehat+itu+Hak:+Panduan+Advokasi+Masalah+Kesehatan+Masyarakat.+&ots=j8sNF5BLyD&sig=pAAUPZh_v5fmP56rlT_0t0EVQM0&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)

Yuningsih, R. (2019). Strategi Promosi Kesehatan dalam Meningkatkan Kualitas Sanitasi Lingkungan. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 10(2), 107–118.
<https://doi.org/10.46807/aspirasi.v10i2.1391>

PROFIL PENULIS



Utara.

Inayyah Nur Fitry Sirajuddin, S.KM., M.Kes
Dosen Program Studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Penulis lahir di Ujung Pandang tanggal 15 oktober 1995. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana dan Magister di Universitas Hasanuddin Makassar. Saat ini penulis merupakan seorang dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.

BAB 9

ADVOKASI UNTUK PENGENDALIAN PENYAKIT

Dhani Syahputra Bukit
Universitas Sumatera Utara, Medan
E-mail: dhanibukit@usu.ac.id

PENDAHULUAN

Advokasi untuk Pengendalian Penyakit adalah suatu upaya strategis untuk mempengaruhi kebijakan dan tindakan yang diperlukan guna mencegah serta menangani penyakit, baik yang menular maupun tidak menular. Advokasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat sistem kesehatan, serta memastikan bahwa setiap individu memiliki akses ke layanan kesehatan yang memadai. Penyakit dapat menimbulkan beban besar, baik secara sosial maupun ekonomi, terutama di wilayah dengan infrastruktur kesehatan yang terbatas. Advokasi memiliki peran krusial dalam merancang kebijakan kesehatan masyarakat serta menangani berbagai ancaman terhadap kesehatan. Melalui advokasi, dilakukan upaya untuk mempengaruhi kebijakan, praktik, dan sistem demi memperbaiki hasil kesehatan dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Strategi advokasi yang efektif mencakup peningkatan kesadaran publik, mobilisasi masyarakat, libatkan para pembuat kebijakan, serta memengaruhi legislasi (Košir, 2024).

Dalam konteks global, banyak negara menghadapi tantangan serius dalam pengendalian penyakit. Penyakit menular seperti COVID-19, malaria, dan TBC terus menyebar, sementara penyakit tidak menular seperti diabetes dan penyakit jantung semakin meningkat. Kondisi ini mengharuskan adanya pendekatan advokasi yang menyeluruh untuk melibatkan semua

pihak yang terkait. Perlindungan kesehatan masyarakat yang efektif memerlukan kerja sama erat antara berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, masyarakat, LSM, dan organisasi internasional (Abbas, 2021). Kolaborasi ini penting untuk menggabungkan sumber daya, keahlian, dan jaringan luas guna meningkatkan efektivitas program kesehatan. Dengan adanya sinergi antar pihak, berbagai tantangan kesehatan dapat diatasi secara lebih komprehensif dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Advokasi untuk pengendalian penyakit tidak hanya berfokus pada pencegahan dan pengobatan, tetapi juga pada penguatan sistem kesehatan agar mampu merespon wabah dengan cepat dan efektif (Bloom & Cadarette, 2019). Penguatan sistem ini mencakup peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan, pelatihan tenaga medis, serta pengadaan sumber daya yang memadai. Dengan demikian, ketika terjadi wabah, sistem kesehatan yang kuat dapat memberikan perlindungan optimal dan meminimalkan dampak pada masyarakat. Peningkatan kualitas layanan kesehatan, fasilitas, dan kapasitas tenaga kesehatan menjadi prioritas yang perlu didukung melalui advokasi. Upaya ini juga mencakup peningkatan akses ke layanan kesehatan bagi kelompok yang rentan, seperti masyarakat miskin, penduduk di daerah terpencil, dan kelompok rentan lainnya.

Peran advokasi semakin krusial ketika dihadapkan pada kendala seperti keterbatasan anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat, dan resistensi dari beberapa pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Dalam situasi seperti ini, Advokasi memiliki peran penting dalam menggalang dukungan serta meningkatkan alokasi anggaran untuk program kesehatan dan pengendalian penyakit. Melalui advokasi, kebutuhan akan dana tambahan dapat dikomunikasikan secara efektif kepada pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan. Evaluasi

Melalui advokasi pengendalian penyakit, masyarakat dapat diberdayakan untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan. Advokasi memberikan edukasi dan keterampilan kepada masyarakat, memungkinkan mereka mengambil langkah preventif dan melakukan deteksi dini terhadap penyakit di lingkungan mereka sendiri. Proses advokasi pengendalian penyakit harus mampu beradaptasi dengan perubahan kebijakan, kondisi lapangan, dan tantangan baru, seperti munculnya wabah. Fleksibilitas ini memastikan bahwa strategi pengendalian tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, M. Z. (2021). Public Understanding and Voluntary Responsibility to Mitigate COVID-19 Pandemic: Role of Local Community Organizations in Information Sharing and Health Literacy. *Asia-Pacific Journal of Public Health*, 33(4), 451–452.
<https://doi.org/10.1177/10105395211002656>
- Bakti, R., RInovian, R., Mahendika, D., & Andrin, V. S. (2023). Membangun Masa Depan yang Lebih Baik: Mengatasi Tunawisma, Kesehatan Mental, Penyalahgunaan Zat, dan Ketenagakerjaan melalui Advokasi, Pendidikan, dan Kolaborasi Komunitas. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(Public Health), 335–344.
- Bloom, D. E., & Cadarette, D. (2019). Infectious disease threats in the twenty-first century: Strengthening the global response. In *Frontiers in Immunology* (Vol. 10, Issue MAR). Frontiers Media S.A.
<https://doi.org/10.3389/fimmu.2019.00549>
- Dahlui, M., Rochmah, T. N., Ernawaty, & Chalidyanto, D. (2021). Economic Evaluation For Health Advocacy And Informed Policy. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 9(Administrasi Kesehatan), 202–207.

- Ginting, D., Ihsan Kamaruddin, M., & Lontaan, A. (2024). Promotive and preventive education of non-communicable diseases for the community. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Edukasi Indonesia*, 1(2), 56–62. <https://doi.org/10.61099/jpmey.v1i2.41>
- Košir, M. (2024). A growing need for advocacy skills and knowledge in promoting population health and well-being: Recommended strategies for alcohol prevention advocacy. *International Journal of Alcohol and Drug Research*, 12(S1), S71–S75. <https://doi.org/10.7895/ijadr.463>
- Olsen, M. H., Neupane, D., Cobb, L. K., Frieden, T. R., Hall, B., Lackland, D. T., Moran, A. E., Mukhtar, Q., & Weber, M. (2020). Global cardiovascular disease prevention and management: A collaboration of key organizations, groups, and investigators in low- and middle-income countries. In *Journal of Clinical Hypertension* (Vol. 22, Issue 8, pp. 1293–1295). Blackwell Publishing Inc. <https://doi.org/10.1111/jch.13939>
- Suryani, D., & Yandrizal. (2022). *Advokasi Pelayanan Kesehatan* (Faiz Muhammad, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Literasi Nusantara.

PROFIL PENULIS



Dhani Syahputra Bukit

Lahir di Kabanjahe 26 April 1987. Tamat Sarjana di Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Sumatera Utara (USU) dan FKM Magister Universitas Indonesia (UI). Saat ini sebagai dosen tetap di Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara dengan jabatan fungsional sebagai Lektor. Fokus utama bidang ilmu adalah promosi kesehatan di dalam masyarakat, dengan minat dan penelitian yang terus berkembang di

bidang media dan teknologi kesehatan. Penelitian melibatkan aspek promosi kesehatan, khususnya perubahan perilaku di kalangan masyarakat yang rentan terhadap bencana, serta promosi kesehatan pada remaja. Salah satu prioritas penelitian adalah perubahan perilaku dalam penanggulangan stunting, dan saya aktif mengembangkan media promosi kesehatan dan teknologi Kesehatan yang menggunakan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Telah melakukan riset untuk mengidentifikasi dan mengubah perilaku masyarakat melalui penerapan teknologi kesehatan berbasis AI. Dalam konteks ini, telah mengembangkan Aplikasi Anak Sehat (ASAH) sebagai salah satu bentuk teknologi kesehatan yang bertujuan untuk menanggulangi masalah stunting di masyarakat. Penelitian berfokus pada upaya promosi kesehatan dan perubahan perilaku dalam masyarakat melalui pendekatan ini.

ADVOKASI KESEHATAN

Buku Advokasi Kesehatan terdiri dari sembilan bab. Bab pertama memperkenalkan konsep dasar advokasi kesehatan, termasuk tujuannya untuk memengaruhi kebijakan dan meningkatkan akses layanan kesehatan. Bab kedua membahas berbagai metode dan strategi, seperti pendekatan komunikasi, kolaborasi, dan negosiasi yang efektif. Selanjutnya, tahapan pelaksanaan advokasi dan pembagian peran antara pemangku kepentingan dijelaskan secara rinci pada bab ketiga. Bab keempat menyoroti pentingnya monitoring dan evaluasi dalam mengukur keberhasilan advokasi kesehatan, sedangkan bab kelima memperkenalkan konsep kemitraan sebagai fondasi kolaborasi lintas sektor. Bab keenam membahas peran kebijakan publik dalam mendorong perubahan yang berkelanjutan, diikuti dengan bab ketujuh yang mengeksplorasi penggunaan media sebagai alat advokasi yang kuat. Etika dalam advokasi, termasuk tanggung jawab moral dan profesional, diuraikan dalam bab kedelapan. Peran tenaga kesehatan sebagai agen perubahan menjadi fokus utama bab kesembilan, yang diakhiri dengan pembahasan tentang advokasi untuk pengendalian penyakit, termasuk penyakit menular dan tidak menular.



FUTURE SCIENCE

Jl. Terusan Surabaya, Gang 1 A No. 71 RT 002 RW 005,
Kel. Sumberasri, Kec. Lowokwaru, Kota Malang,
Provinsi Jawa Timur.
Website : www.futuresciencepress.com



IKAPI
IKATAN PENGETAHUAN INDONESIA

No. 348/JTI/2022

ISBN 978-634-7037-71-8 (PDF)



9 786347 037718